Analisis Perjanjian Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di Sulawesi Selatan

Ahmad Baskam Muhammad,* Jumadil

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

*E-mail: grahajusticia@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and review the optimization of agreements between venture capital companies and business partner companies in South Sulawesi. The location of the study was conducted by the Province of South Sulawesi, by choosing the research target at the regional venture capital company, PT. Sarana Sulsel Ventura and its business partner company in South Sulawesi. The results of the study indicate that the agreement between venture capital companies PT. Sarana Sulsel Ventura with a business partner company in South Sulawesi, has not run optimally. Some influencing factors are: a. Internal factors include weak due diligence by officers, vulnerable monitoring functions, and over financing (overinvestment); b. External factors (PPU) include the character of business partner company, a business loan, a streaming site by the PPU or the use of venture capital that is not in accordance with its purpose and designation, and a business cycle (declining).

Keywords: Agreement; Company; Business competition; Venture Capital Company

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji optimalisasi perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dilakukan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memilih sasaran penelitian pada perusahaan modal ventura daerah yakni PT. Sarana Sulsel Ventura dan perusahaan pasangan usahanya di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara perusahaan modal ventura PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan, belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi yakni: a. Faktor Internal mencakup lemahnya due diligence oleh officer, fungsi monitoring yang lemah, dan over pembiayaan (overinvestment); b. Faktor Eksternal (PPU) mencakup karakter dari perusahaan pasangan usahapiutang usaha dari PPU yang macet, site streaming oleh PPU atau penggunaan modal ventura yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, dan siklus usaha.

Kata Kunci: Perjanjian; Perusahaan; Persaingan Usaha; Perusahaan Modal Ventura

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama

pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Membangun ekonomi perlu keberpihakan pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, untuk mempercepat pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi. yang mana sejak tahun 2005 pemerintah telah mencanangkan tahun usaha mikro serta peningkatan UMKM.

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Se jauh ini usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan yaitu diluncurkannya paket deregulasi berupa Keputusan President No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dengan sasaran pengembangan pasar modal, penyediaan alternative sumber pembiayaan, dan penunjang pengerahan dana masyarakat yang lebih di arahkan pada usaha di bidang asuransi yang merupakan lembaga keuangan bukan Bank. Sebagai tindak lanjut Keppres No. 61 tahun 1988 tersebut, selanjutnya Kementerian Keuangan RI, mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut, semakin mendorong gairah berusaha bagi perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, termasuk Modal Ventura (Venture Capital Company) kehadiran lembaga ini tidak terlepas dari kenyataan semakin sulitnya masyarakat bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan suntikan permodalan dari lembaga perbankan, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank-bank yang ada terutama di daerah-daerah. Sehingga kehadiran lembaga Modal Ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan diharapkan dapat menjembatani pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan menengah, terutama dalam hal penyediaan dana bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk koperasi.

Periodisasi perkembangan modal ventura di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga fase atau periode: Pertama: periode informalistik, yaitu periode dimana dalam masyarakat Indonesia, baik masyarakat asli, maupun masyarakat timur asing seperti India dan Cina, sudah biasa saling membantu terutama antara sesama anggota keluarga dalam arti luas atau antara sesama kerabat. Kedua: periode formatif, yaitu periode dimana bisnis modal ventura sudah mulai memperlihatkan bentuknya, sudah mulai melembaga, terencana dan dengan target tertentu. Akan tetapi, juga masih sarat dengan ideologi untuk membantu pengusaha kecil, Pada masa inilah yang merupakan prototipe dari perusahaan modal ventura Indonesia. Ketiga: periode legalistic, yaitu periode dimana perkembangan modal ventura ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, termasuk modal ventura.

Keputusan presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang ditindaklanjuti kemudian dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, menjadi dasar berdirinya perusahaan modal ventura di hampir semua daerah propinsi diseluruh Indonesia, salah satunya adalah PT. Bahana Arta Ventura (PT. BAV), kemudian dalam perkembangannya PT. Bahana Arta Ventura (PT.BAV) menguasai 20,44 persen saham dari perusahaan modal ventura yang berada di daerah propinsi dan selebihnya saham perusahaan modal ventura dikuasai oleh masyarakat umum.

Perusahaan modal ventura (PMV) yang berada di Sulawesi Selatan adalah PT. Sarana Sulsel Ventura. Badan usaha ini merupakan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang telah berbentuk perusahaan publik. berdiri sejak 01 Desember 1994 dan merupakan perusahaan modal ventura ke empat di Indonesia. yang hingga saat ini terus menjalankan fungsi intermediasinya sebagai sebuah lembaga pembiayaan ventura.

Sejak resmi beroperasi tanggal 01 Desember 1994 sebagai perusahaan modal ventura, PT. Sarana Sulsel Ventura telah menyalurkan pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Investasi. kepada perusahaan pasangan usaha (investee company) (PPU) baik usaha bentuk perorangan maupun badan usaha kategori UMKM maupun non UMKM. Hingga akhir tahun 2009 pembiayaan yang disalurkan keseluruhannya berjumlah Rp. 23,99 milyar, 15,80 milyar disalurkan kepada UMKM dan selebihnya Rp. 8,19 milyar kepada non UMKM. Penempatan modal ventura oleh perusahaan modal ventura (PMV) kedalam perusahaan pasangan usaha, dilakukan dengan perjanjian pembiayaan modal ventura.

Sekalipun antara perusahaan modal ventura (PMV) dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) dilakukan dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, tidak berarti berbagai masalah yang membelenggu terhadap bisnis modal ventura ini, seperti terlalu berbelitnya prosedur masuk maupun keluar ke perusahaan pasangan usaha, kurang tersedianya informasi baik untuk penyediaan dana, perusahaan modal ventura maupun calon perusahaan pasangan usaha. Selain itu, pemahaman masyarakat akan arti dan pentingnya modal ventura juga masih kurang, dan sulitnya diketemukan para entrepreneur yang berbakat, disamping itu trik-trik bisnis yang juga dapat merugikan bisnisnya modal ventura belum mampu dicegah.

Sekalipun usaha-usaha pencegahan telah dilakukan agar pemberian fasilitas pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha tidak menjadi bermasalah, namun tidak mustahil bahwa pengembalian fasilitas pembiayaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura menjadi bermasalah atau dalam kategori pembiayaan yang sakit atau macet (Non Performace Investment) karena alasan-alasan tertentu.

Tidak optimalnya perjanjian antara perusahaan modal ventura (PMV) dengan perusahaan pasangan usaha (PPU), berakibat langsung pada pembiayaan modal ventura menjadi bermasalah atau masuk dalam kategori problem investment, Upaya-upaya penyelamatan pembiayaan modal ventura hanya akan ditempuh oleh perusahaan modal ventura (PMV) apabila PMV memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) masih mempunyai prospek dan selain itu masih ada itikad baik PPU untuk bekerja sama dengan PMV dalam menyelesaikan pembiayaan modal ventura, namun apabila salah satu dari kedua hal tersebut sudah tidak dimiliki lagi oleh PPU atau kedua-duanya hal tersebut sudah tidak dimiliki oleh PPU maka PMV akan menempuh upaya-upaya penyelesaian pembiayaan modal ventura.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu berusaha memaparkan data mengenai perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Penelitian ini dilakukan di Propinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada Perusahaan Modal Ventura (PMV) PT. SARANA SULSEL VENTURA (SSV), beserta 7 (tujuh) Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) termasuk didalamnya yakni Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibiayai dengan penyertaan dengan sistem berupa Bagi hasil/partisipasi terbatas modal ventura dengan mengambil sampel perusahaan pasangan usaha yang tersebar di wilayah daerah kabupaten/kota, yang terdiri atas ; Kota Makassar (1 PPU), Kabupaten Takalar (1 PPU), Kabupaten Jeneponto (1 PPU), Kabupaten Maros (1 PPU), Kota Pare Pare (1 PPU), Kabupaten Sidrap (1 PPU), Kabupaten Wajo (1 PPU),. Pertimbangan menetapkan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian oleh karena daerah tersebut termasuk pusat jaringan pembiayaan modal ventura, serta pada daerah tersebut terdapat Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah dalam pengembalian fasilitas pembiayaan modal ventura.

3. Perjanjian Antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) PT. Sarana Sulsel Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

Pada prinsipnya, untuk memperoleh izin usaha modal ventura, harus mengacu pada ketentuan pasal 13 huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998, yaitu perusahaan modal ventura (PMV) wajib menyampaikan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan, hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan Departemen Keuangan RI, selaku otoritas yang membina perusahaan modal ventura, agar masing-masing pihak baik perusahaan pasangan usaha (PPU) maupun perusahaan modal ventura (PMV) tidak ada yang merasa dirugikan. Hubungan hukum antara PT. Sarana Sulsel Ventura, dengan perusahaan pasangan usahanya yang lahir dari perjanjian pembiayaan modal ventura, dilakukan dengan menggunakan kontrak standar.

Dalam praktik pembiayaan modal ventura pada PT. Sarana Sulsel Ventura, sebelum pembiayaan direalisasikan oleh perusahaan modal ventura (PMV), atau sebelum pembiayaan dapat ditarik oleh pemohon pembiayaan yakni perusahaan pasangan usaha (PPU), terlebih dahulu harus dibuat suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan modal ventura (PMV) dengan perusahaan pasangan usaha (PPU).

Mengenai hak dan kewajiban pihak PT. Sarana Sulsel Ventura, sebagai pihak yang memberikan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha sebagai pihak yang menerima modal ventura yaitu :

a. Kewajiban PT. Sarana Sulsel Ventura

Pada dasarnya kewajiban PT. Sarana Sulsel Ventura, yakni berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usaha yang akan dibiayai, sebesar berapa yang telah disepakati dalam kontrak pemberian modal ventura, namun PT. Sarana Sulsel Ventura masih dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu : melakukan pembinaan kepada perusahaan pasangan usaha dalam bentuk pendampingan operasional, manajemen, dan keuangan, disamping itu kewajiban yang lain ialah melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

- b. Kewajiban perusahaan pasangan usaha
Sementara itu kewajiban perusahaan pasangan usaha yang menerima fasilitas pembiayaan modal ventura dari PT. Sarana Sulsel Ventura, diantaranya: mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak pembiayaan modal ventura, kemudian membayar bagi hasil atas penerimaan fasilitas modal ventura sebesar berapa yang telah disepakati dalam kontrak, selanjutnya perusahaan pasangan usaha berkewajiban juga untuk menerima adanya bantuan manajemen dari PT. Sarana Sulsel Ventura.

Syarat-syarat yang lazim diperjanjikan dalam kontrak antara PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha (PPU)nya, adalah sebagai berikut :

- a. Kesepakatan besarnya persentase bagi hasil yang seharusnya diterima PT. Sarana Sulsel Ventura, dari modal ventura yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha;
- b. Jangka waktu penggunaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha, minimal biasanya 12 (dua belas) bulan dan maksimal hanya 60 (enam puluh) bulan;
- c. Pengaturan tata cara pengembalian modal ventura dari perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Sulsel Ventura, yakni angsuran pokok tambah bagi hasil, atau dengan grass period yakni pembayaran bagi hasil setiap bulan sedangkan pengembalian pokok tiap 3 (tiga) bulan;
- d. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha untuk menarik dana modal ventura dari PT. Sarana Sulsel Ventura;
- e. Biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pasangan usaha;
- f. Pengaturan mengenai asuransi jiwa atau asuransi kerugian;
- g. Pengaturan tentang bantuan manajemen dari PT. Sarana Sulsel ventura kedalam usaha perusahaan pasangan usaha.

Seluruh klausula di atas dituangkan dalam pasal demi pasal perjanjian antara PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) dalam bentuk kontrak standar.

Perjanjian modal ventura secara umum terdiri dari 4 (empat) bagian, yakni :

i. *Judul Perjanjian*

Dalam kontrak perjanjian antara PT. Sarana Sulsel Ventura dengan ke-7 (tujuh) sampel perusahaan pasangan usaha tersebut diatas, judulnya tertulis **Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil**.

Hal ini dimaksudkan agar setiap orang yang melihatnya akan dengan mudah segera mengetahui bahwa akta yang mereka lihat adalah suatu akta perjanjian penyertaan modal ventura.

ii. *Komparisi Perjanjian*

Pada bagian komparisi perjanjian dimuat keterangan lengkap pihak yang terlibat dalam perjanjian baik pihak PT. Sarana Sulsel Ventura maupun pihak perusahaan pasangan usaha, yang mengurai tentang identitas para pihak, dasar hukum yang memberi kewenangan para pihak untuk membuat perjanjian, dan kedudukan masing-masing para pihak.

iii. *Isi Perjanjian*

Perjanjian pembiayaan modal ventura, memuat syarat-syarat serta hak dan kewajiban para pihak, baik PT Sarana Sulsel Ventura maupun perusahaan pasangan usaha (PPU)

iv. *Penutup*

Pada bagian penutup perjanjian pembiayaan modal ventura, merupakan tempat dimuatnya pilihan domisili hukum para pihak, tempat dan tanggal ditandatangani perjanjian, dan tanggal mulai berlakunya perjanjian pembiayaan modal ventura.

4. Pelaksanaan Perjanjian antara PT. Sarana Sulsel Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

Dalam praktik pembiayaan modal ventura dari PT. Sarana Sulsel Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha, masih belum berjalan secara efektif sesuai dengan apa yang diperjanjikan, Jumlah permohonan pembiayaan perusahaan pasangan usaha (PPU) baru yang dapat disetujui untuk ditingkatkan dalam bentuk perjanjian modal ventura antara perusahaan pasangan usaha (PMV) dengan perusahaan modal ventura (PMV)

Merujuk pada kenyataan yang ada bahwa ditengah tingkat pengembalian pembiayaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha (PPU) kepada perusahaan modal ventura diatas, seperti telah digambarkan dalam tabel di atas, ternyata pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura masih terlalu banyak kelemahan-kelemahan yang berujung pada tidak efektifnya pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak.

PPU bermasalah yang ditangani oleh bagian Remedial ditargetkan dapat kembali normal berjalan sesuai perjanjian yang disepakati sehingga dimaksimalkan ada perkembangan dari PPU-bermasalah kembali ke PPU-sehat

Jika mencermati kondisi pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura antara PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha (PPU), sulit dilakukan sebab PPU yang dalam penanganan sekarang adalah PPU dengan tingkat permasalahan yang sulit, sehingga pada proses penyelesaiannya sudah melibatkan pihak ketiga seperti Pengadilan Negeri dan KPKLN,

Berdasarkan hasil penelitian, tingginya tingkat NPI pada PT. Sarana Sulsel Ventura, telah menempatkan PT. Sarana Sulsel Ventura pada Rangking 17 dari 27 (peringkat berdasarkan kondisi kesehatan) Perusahaan Modal Ventura di Seluruh Indonesia, kondisi ini tentu sangat tidak sehat sebab berdampak pada kepercayaan pemerintah kepada PT. Sarana Sulsel Ventura untuk menyalurkan dana-dana pemerintah.

PT. Sarana Sulsel Ventura, berupaya menempuh beberapa kebijakan antara lain :

- a. Melakukan monitoring dan penagihan intensif terhadap PPU yang memiliki tunggakan pokok dan bagi hasil setiap bulan, dengan harapan tingkat kolektibilitas PPU menjadi semakin baik sehingga memberikan pendapatan positif terhadap tingkat profitabilitas maupun kualitas pembiayaan.
- b. Melakukan pertemuan berkala dengan PPU bermasalah yang bobotnya dinilai tergolong berat guna membicarakan solusi penyelesaian dan dibuatkan komitmen penyelesaian secara tertulis yang disepakati bersama.
- c. Melakukan rescheduling, reconditioning dan restructuring terhadap beberapa PPU sehingga kolektibilitasnya diharapkan dapat menjadi sehat kembali.
- d. Melakukan take over dari pemilik lama kepada pemilik baru.

- e. Terhadap beberapa PPU yang tergolong macet dan penanganannya saat ini sudah sampai pada proses/tahap lelang, yang diharapkan dapat terlaksana pada tahun 2010.

Keterlambatan penanganan PPU bermasalah (*remedial*) tersebut di atas disebabkan karena :

1. Jaminan tidak ada.
2. Usaha PPU tidak ada.
3. PPU sudah tidak ada (meninggal/hilang).
4. PPU yang dalam penanganan sekarang adalah PPU dengan tingkat permasalahan yang sulit, sehingga pada proses penyelesaiannya sudah melibatkan pihak ketiga seperti Pengadilan Negeri, KPKNL dan Kepolisian.
5. Jadwal pengajuan permohonan eksekusi (litigasi) atas beberapa PPU yang rencananya akan diproses di awal tahun mundur ke akhir tahun karena PPU tersebut masih ingin menyelesaikan kewajibannya tanpa melalui proses litigasi, namun pada akhirnya PPU tersebut tetap tidak mampu.
6. Adanya beberapa asset PPU yang sudah dikuasai namun sangat sulit untuk melakukan penjualan atas jaminan tersebut karena kurang peminat dan belum mendapatkan pembeli.

Upaya penyelamatan pembiayaan yang bermasalah terus dilakukan oleh bagian monitoring PT. Sarana Sulsel Ventura yaitu dengan melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Tetap melakukan penagihan kepada PPU, apabila tidak ada akan diupayakan untuk diusulkan hapus buku dan tidak hapus tagih dan apabila ada pembayaran akan dibukukan secara extra countable.
2. Mengupayakan mencari asset PPU yang lain untuk dijual guna menyelesaikan kewajibannya.
3. Tetap melakukan penagihan terhadap keluarga PPU dan apabila PPU menghilang diupayakan untuk mencari dengan bekerja sama dengan pihak keluarga PPU dan kalau perlu melibatkan pihak kepolisian.
4. Tetap mengikuti proses gugatan secara perdata sesuai hukum yang berlaku, apabila proses tersebut selesai akan dilanjutkan dengan proses lelang.
5. Dengan tidak terlaksananya keinginan PPU untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa melalui proses lelang, maka pada saat ini beberapa PPU litigasi sudah dalam putusan pengosongan oleh Pengadilan Negeri dan ada yang dalam proses mediasi oleh pihak kepolisian.
6. Terhadap objek jaminan tersebut tetap dilakukan penawaran kepada PPU atau pihak lain yang berminat dan melakukan penjualan bersama-sama dan tetap menagih ke PPU dengan mencari sumber pendapatan lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura (PMV) untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ada beberapa Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Hubungan Hukum Antara PMV PT. Sarana Sulsel Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah, dilakukan sebagai upaya dan tindakan nyata perusahaan modal ventura (bukan melalui lembaga hukum) yang harus dilakukan dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali

antara PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha dengan memperlunak syarat-syarat pengembalian fasilitas pembiayaan, sehingga dengan memperlunak syarat-syarat pengembalian fasilitas pembiayaan tersebut diharapkan perusahaan pasangan usaha dapat memiliki upaya dan kemampuan kembali untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Upaya penyelamatan pembiayaan sebagaimana tersebut, sering disebut dengan istilah restrukturisasi pembiayaan, yakni upaya penyehatan PPU melalui perbaikan struktur pembiayaan dengan mengutamakan penyelesaian secara komersial melalui: Penjadwalan kembali (Rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), dan Penataan Kembali (Restructuring).

Berdasarkan hasil penelitian tujuan dilakukannya restrukturisasi ialah untuk menjaga kepastian pembayaran/pelunasan kewajiban PPU, untuk meningkatkan kapabilitas perusahaan pasangan usaha dan untuk menyempurnakan serta memperkuat aspek hukum.

Metode Restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. Sarana Sulsel Ventura, terhadap perusahaan pasangan usaha (PPU) yang bermasalah antara lain :

- a. *Resceduling* yakni perubahan jadwal pembayaran (jangka waktu) kewajiban perusahaan pasangan usaha, termasuk pemberian tenggan waktu;
- b. *Reconditoning* yakni perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan;
- c. *Restructuring* yakni PT. Sarna Sulsel Ventura melakukan penataan kembali struktur fasilitas pembiayaan dengan cara penambahan jumlah fasilitas pembiayaan, konversi fasilitas pembiayaan ke instrument lain seperti, Saham, Obligasi Konversi, atau Bagi hasil

b. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*

Penyelesaian pembiayaan modal ventura yang bermasalah dilakukan oleh PT. Sarana Sulsel Ventura, sebagai upaya dan tindakan nyata melalui lembaga hukum atau litigasi, seperti Pengadilan atau Dirjen Piutang dan Lelang Negara Dep Keuangan RI, dikarenakan langkah atau upaya penyelamatan sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Tujuan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini melalui lembaga hukum tersebut, adalah menjual atau mengeksekusi benda atau barang jaminan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui langkah-langkah yang ditempuh oleh PT. Sarana Sulsel Ventura, dalam upaya untuk penyelesaian pembiayaan modal ventura yang bermasalah (macet) melalui lembaga-lembaga hukum antara lain meliputi :

- a. Somasi
- b. Gugatan Perdata *Wanprestasi* kepada PPU
- c. Eksekusi putusan Pengadilan *uitvoerbaar bij voorrad* (pelaksanaan putusan terlebih dahulu)
- d. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang
- e. Eksekusi Hak Tanggungan/Grosse Akta Hipotik
- f. Parate Eksekusi hak Tanggungan
- g. Eksekusi terhadap penjamin (borgtocht)
- h. Paksa Badan/Penyanderaan/Gijzeling
- i. Kepailitan
- j. Eksekusi melalui panitia urusan piutang negara dan Dirjen Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)

5. Faktor yang Mempengaruhi Perjanjian Antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) Dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) di Sulawesi Selatan

Optimalisasi perjanjian antara perusahaan modal ventura (PMV) PT. Sarana Sulsel Ventura sebagai salah satu perusahaan modal ventura di Sulawesi Selatan dengan perusahaan pasangan usaha (PPU), maka perlu pula untuk diketahui mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan tersebut, baik dari aspek pendukungnya maupun aspek yang tidak mendukung, hal ini sangat penting karena keberadaannya untuk mempermudah pemetaan terhadap kelemahan maupun kekurangan perusahaan modal ventura (PMV) dan perusahaan pasangan usahanya (PPU)

Terjadinya pembiayaan bermasalah pada tubuh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sangat berdampak negatif bagi PT. Sarana Sulsel Ventura yakni tidak tercollecnya dana modal ventura yang sudah disalurkan sesuai jadwal sehingga mengakibatkan terbatasnya dana yang dimiliki oleh PT. sarana Sulsel Ventura, disamping itu biaya (cost) yang harus dikeluarkan terlalu besar untuk melakukan upaya hukum.

Dampak yang lain ialah, sulitnya PT. Sarana Sulsel Ventura untuk mengakses permohonan tambahan dana kepada Pemerintah RI dalam hal ini Dep. Keuangan dan Dep Koperasi, disebabkan karena tingkat posisi Non Performing Investasi (NPI) PT. Sarana Sulsel Ventura, sudah berada pada ambang batas tidak wajar.

Hal inilah yang menyebabkan belum berkembangnya PT. Sarana Sulsel Ventura seperti lembaga keuangan yang lain Bank atau Finance, tidak berjalannya perjanjian secara optimal antara PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha (PPU)nya, semakin mendorong banyaknya pembiayaan PT. Sarana Sulsel Ventura yang bermasalah.

5.1. Faktor Internal PT. Sarana Sulsel Ventura (PMV)

5.1.1. Lemahnya *due dilligence* oleh officer

Survey mengenai tanggapan responden, terhadap pengaruh lemahnyanya uji tuntas (*due dilligence*), terhadap perjanjian pembiayaan antara PMV dengan PPU di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui lemahnya *due dilligence* oleh Venture Capital Officer (VCO) dalam menganalisa rencana pembiayaan CPPU, kurang *comprehensive*, disini officer hanya berpatokan pada informasi sepihak dari pemohon (CPPU), officer tidak melakukan Trade Checking ke Supplier atau berupaya mencari referensi lain. Disamping itu, officer yang menganalisa rencana pembiayaan modal ventura kepada PPU tidak paham atas jenis usaha PPU sehingga antisipasi (mitigasi) Risiko jadi terabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada salah satu perusahaan pasangan usaha (PPU) PT. Sarana Sulsel Ventura yaitu Tiga Putri Mandiri CV. di Makassar, PPU ini bergerak dalam bidang Industri Makanan pada saat diajukan permohonan rencana pembiayaan ke PT. Sarana Sulsel Ventua, PPU bermohon untuk dibiayai investasi pembelian mesin produksi yaitu mesin packing, karena lemahnya *due dilligence* terhadap permohonan pembiayaan ini, maka terjadi *mark up* harga pembelian mesin yang dilakukan oleh PPU dengan *Suplier* mesin tersebut.

5.1.2. Kebijakan turun dari atas

Terdapat beberapa kasus terjadi di PT. Sarana Sulsel Ventura dimana calon perusahaan pasangan usaha itu merupakan pihak yang direkomendasi oleh Direksi Perseroan, kecenderungan yang dapat merugikan ialah apabila officer “terpaksa” meloloskan perusahaan pasangan usaha tersebut, karena merasa tidak enak dengan Direksi Perseroan yang mengusulkan.

Ada juga beberapa PPU yang mendapat perlakuan khusus dari Direksi Perseroan, antara lain kebijakan tentang collateral coverage (nilai penjaminan) yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) misalnya tidak marketable, atau tidak memenuhi collateral coverage yang disyaratkan, hal lainnya officer merasa tidak enak untuk memberikan klausula syarat tertentu untuk mengurangi risiko.

5.1.3. Fungsi monitoring lemah;

Lemahnya monitoring usaha yang dijalankan oleh pada PT. Sarana Sulsel ventura, karena officer kurang melakukan kunjungan lapangan untuk memantau jalannya usaha perusahaan pasangan usaha sekaligus memonitor penggunaan fasilitas dana modal ventura yang diterima PPU.

Berdasarkan hasil penelitian, lemahnya monitoring ini menjadi salah satu penyebab lambatnya perusahaan modal ventura mendapat sinyal-sinyal kalau perusahaan pasangan usaha perlu mendapat perhatian khusus, yang menjurus pada tidak optimalnya perjanjian pembiayaan dan mengarah ke macet, Lemahnya fungsi monitoring PT. Sarana Sulsel Ventura dalam memonitor terhadap jalannya perjanjian dengan perusahaan pasangan usaha, bisa juga terjadi karena officer bersangkutan yang menangani PPU sejak awal, tidak terbuka dan berupaya menutupi kelemahan PPU yang ditanganinya, hal ini karena officer ingin mempertahankan reputasinya sebagai seorang analisis, sehingga berusaha untuk memperbaiki sendiri kondisi yang dialami oleh perusahaan pasangan usaha (PPU), sekalipun dalam hal ini diperlukan bantuan pihak monitoring yang khusus menangani hal tersebut.

5.1.4. Over pembiayaan (overinvestment)

Dalam konteks pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha, seorang officer (Venture Capital Officer) harus mengerti dan memahami besarnya kebutuhan yang sebenar-benarnya dari calon perusahaan pasangan usaha (CPPU), yaitu dengan penajaman analisis disertai mitigasi risiko apabila pembiayaan kepada CPPU disetujui. Dalam proses proposal investasi CPPU dibutuhkan kejelian dan ketajaman dari seorang officer sebab apabila seorang officer kurang jeli dalam hal ini maka kemungkinan besar pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Sarana Sulsel Ventura kepada perusahaan pasangan usaha menjadi over capacity atau overinvestment.

Berdasarkan ketentuan syarat dan prosedur investasi, setiap perusahaan pasangan usaha hanya boleh menikmati 2 (dua) fasilitas yang berjalan, permohonan fasilitas PPU yang ketiga hanya dapat disetujui apabila 1 (satu) fasilitas dilunasi terlebih dahulu baik divestasi positif maupun divestasi dini.

5.2. Faktor Eksternal (PPU)

5.2.1. Karakter dari perusahaan pasangan usaha (PPU)

Dalam penyaluran pembiayaan modal ventura, perusahaan modal ventura menghadapi risiko yang tinggi, yaitu tidak kembalinya pembiayaan modal ventura yang telah disalurkan kepada perusahaan pasangan usaha (PPU).

Faktor karakter PPU, menjadi faktor utama dalam perjanjian pembiayaan antara PMV dengan PPU. Hal yang sangat perlu untuk dipraktikkan dalam pembiayaan modal ventura adalah *character* (karakter) dari perusahaan pasangan usaha (PPU) yakni keadaan watak atau sifat perusahaan pasangan usaha, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam pergaulan bisnis dunia usaha yang digeluti PPU.

Kegunaan dari penilaian terhadap karakter perusahaan pasangan usaha adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan (*willingness to pay*) perusahaan pasangan usaha untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian, Karakter dari perusahaan pasangan usaha (PPU) sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura.

5.2.2. Tagihan/Piutang usaha dari PPU yang tidak tertagih

Salah satu alasan yang mempengaruhi perjanjian pembiayaan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha adalah adanya tagihan-tagihan (piutang) perusahaan pasangan usaha pada pihak ke tiga yang tidak berjalan baik (tidak tertagih), sehingga perusahaan pasangan usaha (PPU) belum atau tidak melakukan pembayaran pengembalian fasilitas pembiayaan modal ventura sesuai jadwal yang diperjanjikan antara kedua belah pihak.

Kemampuan bayar oleh perusahaan pasangan usaha sangat dipengaruhi oleh kelancaran keuangan usaha yang dijalankan oleh perusahaan pasangan usaha, apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya PPU banyak melakukan penjualan produk secara kredit, maka yang harus diperhatikan adalah perkembangan realisasi produksi dan perlu untuk diperhatikan umur dari piutang-piutang usaha perusahaan pasangan usaha.

5.2.3. Faktor penyimpangan penggunaan dana (*site streaming*) oleh PPU atau penggunaan modal ventura yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kasus terjadinya pembiayaan bermasalah (*problem loan*) disebabkan oleh faktor penyimpangan penggunaan dana, hal ini bisa terjadi karena perusahaan pasangan usaha sejak awal telah memiliki niat yang tidak baik, fasilitas pembiayaan modal ventura yang diterimanya dari PT. Sarana Susel Ventura tidak digunakan sesuai tujuan dari pembiayaan tersebut, tetapi PPU gunakan untuk kepentingan yang lain misalnya saja untuk membayar tagihan hutang pada pihak III.

Penyimpangan penggunaan dana fasilitas pembiayaan modal ventura ini juga terjadi kerana pembiayaan yang diberikan PT. Sarana Susel Ventura dialihkan oleh perusahaan pasangan usaha untuk membiayai usaha lain (ekspansi usaha) diluar dari scenario awal diajukannya permohonan pembiayaan.

5.2.4. Siklus usaha (Declining)

Keterbatasan kemampuan SDM officer PT. Sarana Sulsel Ventura yang menangani proses analisis pembiayaan, seringkali menyebabkan tidak diprediksinya kondisi dimana usaha perusahaan pasangan usaha pada saat diajukan permohonan pembiayaan berjalan dalam kondisi yang sudah menurun.

Kondisi yang dialami oleh perusahaan pasangan usaha tersebut, sangat mempengaruhi tingkat kolektibilitas pengembalian pembiayaan pada PT. Sarana Sulsel Ventura, dan secara langsung memberi pula pengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati.

6. Penutup

Perjanjian antara perusahaan modal ventura (PMV) PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) di Sulawesi Selatan, berjalan kurang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal (PMV) yang meliputi Lemahnya *due diligence* oleh officer; Kebijakan turun dari atas; Fungsi monitoring lemah; dan Over pembiayaan (overinvestment). Selain itu, faktor eksternal (PPU) **mencakup** karakter dari perusahaan pasangan usaha (PPU); Tagihan/Piutang usaha dari PPU yang tidak tertagih/macet; Faktor *site streaming* oleh PPU atau penggunaan modal ventura yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya; dan Siklus usaha (*declining*).

Diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut, sebagai upaya pencegahan dini, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu perjanjian pembiayaan modal ventura. Bagi PT. Sarana Sulsel Ventura, dipandang perlu untuk dilakukan upaya peningkatan lebih lanjut kualitas fungsi-fungsi officer perusahaan modal ventura, melalui pelatihan-pelatihan analisis yang berkesinambungan, workshop, untuk meningkatkan skill dan knowledge officer agar memiliki ketajaman dalam melakukan analisis terhadap calon perusahaan pasangan usaha, agar secara teliti dan selektif menyalurkan pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha, dan secara konsisten dan berkualitas baik.

Referensi

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Qahar, 2007, *Analisis Yuridis Penyertaan Modal Ventura Dalam Rangka Pemberdayaan Perusahaan Pasangan Usaha Di Sulawesi Selatan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Segi-segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, perikatan pada umumnya*, penerbit Alumni, Bandung.
- Jamaluddin, 2005, *Analisis Hukum Pernanan Modal Ventura Dalam Pengembangan Usaha Swasta Nasional Di Sulawesi Selatan*, Tesis, Program studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2001, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung

- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI) Jakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Veitzhal Rivai, 2006, *Credit Management Handbook*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.